

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 PEMATANGSIANTAR)

Jeremia Pratama Sinaga<sup>1</sup>, Marlon Sihombing<sup>2</sup>, Muryanto Amin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

<sup>2,3</sup>Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email: jeremiapratamast@student.usu.ac.id

### ABSTRACT

*This research is a qualitative descriptive approach and the object of research is involved elements such as the school Principal, Vice Principal Curriculum and teachers at SMPN 7 Pematangsiantar. The focus of this research is to identify and analyze the implementation of Curriculum Policy, 2013 in SMPN 7 Pematangsiantar using a model that was initiated by George C. Edward III in the form of communication, resources, disposition and bureaucratic structures that play a role in policy implementation. The data used is the verbal data from respondents information about the implementation of curriculum policy in 2013 in SMPN 7 Pematangsiantar. The technique of collecting data using interviews, observation and documentation. Analysis of the data in this study include stage data reduction, data presentation and data verification or conclusion. The results showed that the implementation of curriculum policy in 2013 in SMPN 7 Pematangsiantar generally running well but not optimal. Until runs in the third year, the evaluations are made every year to make more optimal implementation of this policy. In the communication factor, sub factor and consistency of information transmission has not gone well, from the sub factor clarity there is little problem. The vagueness of this information related to the curriculum changes that took effect too quickly.*

**Keywords :** Implementation, policy curriculum 2013, Communication, Resources.

### ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek penelitiannya adalah melibatkan unsur-unsur sekolah seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan guru-guru di SMPN 7 Pematangsiantar. Fokus penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Kebijakan Kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar dengan menggunakan model yang digagas oleh George C. Edward III berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar secara umum berjalan dengan baik namun belum optimal. Hingga berjalan di tahun ke tiga, dengan evaluasi-evaluasi yang dibuat tiap tahun membuat pelaksanaan kebijakan ini lebih optimal.*

**Kata kunci :** Implementasi, Kebijakan Kurikulum 2013, Komunikasi, Sumber daya

### PENDAHULUAN

Perubahan Kurikulum memiliki tujuan meningkatkan rasa ingin tahu dan keaktifan siswa. Bahan uji publik Kurikulum 2013 menjelaskan standard penilaian kurikulum baru selain menilaikeaktifan bertanya, juga menilai proses dan hasil observasi siswa serta kemampuan siswa menalar masalah yang diajarkan guru sehingga siswa diajak berpikir logis dan kritis. Elemen perubahan Kurikulum 2013 meliputi perubahan standard kompetensi lulusan, standard proses, standard isi, dan standard penilaian. Standard kompetensi lulusan dibedakan menjadi domain sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



Disamping itu, kurang optimalnya sosialisasi melalui penataran ataupun pelatihan kepada seluruh pelaksana dilapangan membuat para guru masih cukup banyak yang kebingungan. Bila kurang aktifnya guru dalam sosialisasi Kurikulum 2013, membuat berbagai pihak menganggap implementasi Kurikulum 2013 tidak akan berjalan mulus. Disisi lain, pihak yang mendukung perlunya perubahan kurikulum menganggap perubahan tersebut perlu untuk memenuhi tantangan perkembangan zaman. Bila kurikulum tidak mengikuti perubahan, lulusan yang dihasilkan adalah lulusan usang yang tidak terserap di dunia kerja nantinya. Selain itu pemerintah melakukan beberapa hal untuk menanggapi permasalahan dalam implementasi kurikulum baru. Pemerintah melakukan uji publik melalui dialog tatap muka di beberapa daerah, secara online di website kemendikbud, dan secara tertulis yang dikirim ke beberapa perguruan tinggi dan dinas pendidikan. Selanjutnya, diadakan sosialisasi di berbagai kota besar mengenai implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Berbagai pendapat yang berkembang dengan adanya perubahan Kurikulum menunjukkan bahwa guru memegang peran penting dalam perubahan Kurikulum. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat, jika guru yang menjalankan tidak memiliki kemampuan yang baik, maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah seolah dikejar target dalam mengimplemetasikan Kurikulum 2013. Padahal dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang penyusunannya diserahkan ke sekolah sejak 2006 belum sepenuhnya tercapai, kini guru dihadapkan lagi pada persoalan kurikulum baru. Keyakinan pemerintah yang menyatakan bahwa rancangan Kurikulum 2013 yang telah diujipublikasikan sudah dinyatakan siap untuk diberlakukan Juli 2013 namun kenyataannya belum selaras dengan para guru dan pelatih guru. Dengan tantangan geografis Indonesia, tentu menyiapkan guru dalam waktu singkat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua persoalan menyangkut kesiapan guru akan dapat menghambat pemahaman dan implementasi konsep dasar pendidikan yang diusung kurikulum baru. Apabila guru memang benar kurang siap seperti yang diberitakan, maka dalam pelaksanaannya implementasi Kurikulum 2013 tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan pada masa awal diberlakukannya Kurikulum 2013 ini menegaskan bahwa Kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya mempersiapkan generasi Indonesia 2045 yaitu tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, sekaligus memanfaatkan populasi usia produktif yang jumlahnya sangat melimpah agar menjadi bonus demografi dan tidak menjadi bencana demografi. Namun kenyataannya memang dengan banyaknya lembaga, organisasi maupun perseorangan yang terlibat dalam perubahan kurikulum 2013 ini, belum menjadi jaminan bahwa kurikulum tersebut mampu membawa pendidikan bangsa dan negara ini kearah yang lebih maju dan lebih baik.

Sikdiknas (2012) menyatakan sedikitnya ada dua faktor besar dalam keberhasilan kurikulum 2013. Faktor penentu pertama yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Faktor penentu kedua yaitu faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: (i) ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standard pembentuk kurikulum; (ii) penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; dan (iii) penguatan manajemen dan budaya sekolah. Guru juga dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi profesional, namun juga harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kompetensi pedagogik guru perlu untuk diketahui karena kompetensi tersebut berkaitan dengan pengembangan kurikulum serta proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selain itu, dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat menerapkan pendidikan karakter secara spontan dalam setiap proses pembelajaran agar siswa dapat memenuhi kompetensi sikap. Tulisan ini berupaya untuk menjawab bagaimana Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) 7 Pematangsiantar”

## KAJIAN TEORI

### Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkalidikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Apa itu *policy* atau kebijakan? Donovan dan Jackson dalam Keban (2004: 55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

James E. Anderson dalam Wahab (1997:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (1997:3) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

### Latar Belakang Kurikulum 2013

Fadillah (2013), Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi (KBK) maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam konteks ini, "kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang terceminkan pada sikap dapat dibandingkan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di bangku sekolah.

Menurut E. Mulyasa (2009), Kurikulum 2013 yakni yang berbasis karakter dan kompetensi yang lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum sebelumnya, kurikulum 2006 atau lebih dikenal KTSP, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Disamping itu kurikulum 2013 juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan pedagogi, dan kompetensi masa depan.

### Konsep dasar kurikulum 2013

Kurikulum 2013 diawali dari kegelisahan melihat sistem pendidikan yang diterapkan selama ini hanya berbasis pada pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan siswa. Selain itu, diperlukan keterampilan dan sikap yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan lulusan yang andal dan beretika untuk selanjutnya siap berkompetensi secara global. Berubahnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya memperbaharui setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Daryanto (2013) mengatakan Pengembangan Kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

- a. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar nama pelajaran.
- b. Standard kompetensi lulusan ditetapkan untuk satuan-satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan.
- c. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berfikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas didalam berbagai mata pelajaran.
- d. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan didalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi.

- e. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat.
- f. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar.
- g. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Oleh karena itu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat hasil-hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- h. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan.
- i. Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- j. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sunarti (2013), Kurikulum 2013 memadukan tiga konsep yang menyeimbangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Melalui tiga konsep itu keseimbangan antara *hardskill dan softskill* dimulai dari Standard Kompetensi Lulusan, Standard Isi, Standard Proses dan Standard Penilaian. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah, pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan-jaringan untuk semua mata pelajaran.

### Tujuan Kurikulum 2013

Mengenai tujuan dan fungsi kurikulum secara spesifik mengacu pada Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang sisdiknas ini disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuannya yaitu untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dll. Tentunya kurikulum 2013 juga memiliki tujuan dan fungsi yang didasarkan pada undang-undang Sistem pendidikan Nasional tersebut. Namun dilihat dari pengembangan Kurikulum 2013 yang disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuannya terperinci sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan *hard skills* dan *soft skills* melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
- b. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif kreatif dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan Negara Indonesia.
- c. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua kompetensi kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran.
- d. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
- e. Meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan keleluasan untuk mengembangkan Kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik dan potensi daerah.

### Landasan Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian

yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri.

Fadillah (2013) mengemukakan tiga landasan utama dalam pengembangan kurikulum 2013, yaitu: (1) filosofis; (2) yuridis; (3) konseptual. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan secara ringkas ketiga landasan tersebut:

a. Filosofis

Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat dan bangsa.

b. Yuridis

Yuridis berarti hukum/peraturan, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baru yang patut ditaati. Sedangkan landasan yuridis disini adalah suatu landasan yang digunakan sebagai payung hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.

Ibid (2013), Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum 2013 landasan yuridis yang digunakan antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan yang berarti tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum.
- c) Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; Penyempurnaan Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Aktif;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e) Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013.

c. Konseptual

Landasan konseptual adalah suatu landasan yang didasarkan pada ide atau gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa konkret.

### **Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013**

Menurut Daryanto (2013), ada sejumlah prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- a. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran.
- b. Standard kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan.
- c. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan berfikir, psikomotorik yang dikemas didalam berbagai macam mata pelajaran.
- d. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dikuasai dan dipelajari peserta didik.
- e. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat.
- f. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya.
- g. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni.
- h. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan.
- i. Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- j. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Format penelitian kualitatif yang dipilih untuk meneliti implementasi kebijakan adalah format kualitatif deskriptif, yaitu; sebuah format yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar yang seharusnya dan idealnya berpatokan kepada Standard Operasional Prosedur untuk kemudian membandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan sekaligus mencari dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum 2013 tersebut.

## PEMBAHASAN

### Pembahasan Hasil Penelitian

Pada *subpoint* ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Pematangsiantar yang terdapat pada *subpoint* sebelumnya, dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut :

Kebijakan Kurikulum 2013 adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik. Kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka.

Kebijakan kurikulum 2013 terutama bagi guru SMP yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dalam pandangan beberapa ahli, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar adalah : **1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi**

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan sangat sulit kebijakan itu akan berhasil.

#### 2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sebagai catatan, sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen.

#### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang memiliki *standard operating procedures* atau (*SOP*). *SOP* menjadi

pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Transmisi/Penyampaian Pesan

Proses penyampaian Informasi kebijakan Kurikulum 2013 dilakukan oleh Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada implementor lapangan. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan Kurikulum 2013 dapat tertransformasikan secara tepat di tiap tingkat satuan pendidikan. Penyampain informasi tersebut dilakukan pada saat pelatihan, workshop, diskusi, dan dialog yang difasilitasi oleh LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota dan dari sekolah itu sendiri (*In House Training*). Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan penjelasan secara jelas kepada Kepala Sekolah dan guru-guru sebagai pelaksana kebijakan Kurikulum 2013.

Pelatihan merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para tenaga pengajar yang diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Adanya pelatihan tentang Kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun ajaran 2014/2015 ini diharapkan setiap peserta pelatihan nantinya memiliki beberapa kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan pembelajaran berbasis pendekatan *scientific* (mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta), tematik dan terintegrasi dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, maupun intelektual.

Setelah mengikuti pelatihan, guru-guru tersebut bertugas untuk menjelaskan kembali hasil pelatihan yang diterima kepada guru-guru yang lain agar para guru yang belum mendapatkan pelatihan juga dapat memahami inti perubahan Kurikulum 2013 serta dapat mencermati secara bersama-sama perbedaan dari kurikulum sebelumnya.

Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa transmisi dilakukan dengan cara penyuluhan dinilai tepat, penyuluhan yang dilakukan oleh LPMP Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar tentang kebijakan Kurikulum 2013 kepada Kepala Sekolah dan guru dilakukan pada kegiatan rapat, latihan, seminar, bimbingan teknik, diskusi dan dialog. Ataupun dengan cara guru sendiri yang mencari memanfaatkan media internet. Maka transmisi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik.

Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transmisi pada implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Pematangsiantar berjalan sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Belum optimalnya dapat dilihat dari proses awal yaitu penyampaian/sosialisasi dan pelatihan terkait kurikulum 2013 sarannya belum menyeluruh. Pemerintah provinsi hanya melatih perwakilan dari setiap guru bidang studi. Setelah mereka dilatih kemudian ditugaskan untuk menjadi narasumber ditingkat kab/kota bekerja sama dengan dinas

pendidikan setempat. Hal ini lah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dari evaluasi tiap tahunnya bisa lebih baik lagi.

**b. Kejelasan**

Berdasarkan data mengenai hasil indikator kejelasan komunikasi, terdapat dua metode penyuluhan yang dilakukan yaitu penyuluhan secara langsung dan penyuluhan tidak langsung yaitu melalui media cetak. Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 sudah cukup baik, hal ini karena para sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan Kurikulum 2013. Hal tersebut bisa terjadi karena Pembuat kebijakan sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan dialog yang selama ini sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi atau pelatihan yang diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung oleh LPMP dan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar yang selama ini diselenggarakan, guru-guru dapat secara langsung bertanya tentang apa yang masih belum mereka pahami tentang kurikulum 2013.

Sesuai dengan pendapat George C. Edward III bahwa jika kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas sampai kesasaran kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator kejelasan pada implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 di Kota Pematangsiantar cukup berjalan maksimal, hal ini terlihat dari metode penyuluhan secara langsung yang diikuti implementor lapangan dalam hal ini para guru. Namun memang proses ini dinilai membutuhkan waktu yang relatif panjang agar target atau sasaran kurikulum 2013 dapat benar-benar tersampaikan dengan lebih baik.

**c. Konsistensi**

Kurikulum 2013 merupakan langkah yang dipilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan selama ini. Kurikulum 2013 sudah berjalan cukup baik di SMPN 7 Pematangsiantar dan didukung dengan peran aktif instansi terkait serta guru-guru dari tiap tingkat satuan pendidikan. Konsistensi dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar sudah berjalan berdasarkan pelaksanaan pelatihan yang diberikan dari Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota secara konsisten telah dijalankan oleh Dinas Pendidikan secara manual. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam kurikulum 2013 harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus. Namun dibutuhkan kesabaran dan konsistensi lebih dalam penerapannya agar hasilnya maksimal dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Dengan adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 5 Desember 2014 sempat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, sebab Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa akan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester agar kembali menggunakan KTSP dan juga bagi sekolah-sekolah yang telah menggunakan kurikulum 2013 selama tiga semester kembali menggunakan KTSP atau tetap menerapkan kurikulum 2013 disekolahnya. Hal ini menandakan tidak adanya konsistensi dari pemerintah pusat sehingga sekolahpun menjadi ragu. Akibatnya terjadi kesimpangsiuran, dan hal ini tentu akan menyulitkan para pelaksana kurikulum disekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, SMPN 7 Pematangsiantar selaku salah satu dari 5 sekolah percontohan yang melaksanakan kurikulum 2013 juga sempat mengalami kebingungan dengan adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Namun akhirnya dengan konsultasi dengan Dinas Pendidikan, SMPN 7 tetap melaksanakan kurikulum 2013 dikarenakan pertimbangan bahwa mereka ditunjuk satu dari 5 Sekolah Menengah Pertama yang tetap memberlakukan Kurikulum 2013 ini, dan pada tahun 2019 seluruh sekolah harus melaksanakan kurikulum 2013 sehingga mereka harus mempersiapkan diri dari sekarang.

Dan dari data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013, peneliti mengamati dan dapat dikatakan belum baik karena perintah yang diberikan sering berubah-ubah. Hal ini terjadi pada kebijakan kurikulum 2013 yang belum konsisten sehingga sempat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan. Kondisi yang terjadi belum sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

### Sumberdaya

Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 100) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Faktor sumberdaya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar.

Faktor ini meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Kurang terpenuhinya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

- a) Komponen yang pertama adalah **staf**. Menurut pendapat Edwards dalam Budi Winarno (2002:132), staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Namun, jumlah atau kuantitas tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Sejalan dengan hal itu, meskipun dari segi jumlah pelaksana kurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar tidak terlalu banyak namun dengan bekal kemampuan yang dimiliki ataupun dengan klasifikasi pendidikan yang mayoritas S1 dibidang studi masing-masing maka mereka berusaha mampu menyelesaikan tupoksi yang diemban kepadanya.
- b) **Informasi** merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam hal implementasi kebijakan kurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013. Dan hal-hal baru terkait perkembangan kurikulum 2013.
- c) Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah **kewenangan** untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dalam pelaksanaankurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar, Sekolah mampu menjalankan wewenang secara efektif.

Menurut Edward dalam Budi Winarno (2002:136), para pejabat dari yurisdiksi tingkat tinggi dalam menangani implementasi biasanya meminta bantuan dan saran pejabat-pejabat yurisdiksi tingkat rendah. Para pejabat pada tingkat yurisdiksi yang lebih tinggi ini sering meminta pandangan (*sharing*) kepada pejabat di tingkat yang lebih rendah atau para pelaksana tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Dengan cara seperti ini setidaknya ada dua keuntungan yang dapat diraih, pertama mendorong keterlibatan para pelaksana kebijakan sehingga pada akhirnya akan mendorong partisipasi. Kedua, mengeliminasi penolakan yang mungkin timbul dari para pelaksana kebijakan. Minimal, para pelaksana kebijakan memberikan apa yang diminta oleh para perumus kebijakan.

Hal ini terjadi pada implementasi kebijakan kurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar. Pihak Dinas Pendidikan melibatkan para kepala sekolah untuk partisipatif dalam pelaksanaankurikulum 2013 SMPN 7 di Kota Pematangsiantar. Selain itu, para kepala sekolah diminta dapat memfasilitasi guru untuk mendapatkan pelatihan dan diklat K-13. Banyak hal dalam kurikulum 2013 yang membutuhkan peran aktif kepala sekolah. Salah satu contohnya adalah penilaian tentang kinerja atau ke professionalan seorang guru bidang studi. Hal ini cukup membantu mengurangi tingkat *missed communication* guru yang bersangkutan. Bahkan jika memungkinkan, secara internal kepala sekolah dapat membentuk tim penilai kurikulum guru bidang studi. Tugas tim internal ini adalah menilai kompetensi guru di luar penilaian yang bersifat rahasia. Dengan adanya tim ini di sekolah, kepala sekolah akan mengetahui dengan tepat guru-guru yang semakin menunjukkan kemajuan dibidang studinya masing-masing.

### **Fasilitas**

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi Kurikulum 2013 kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti bahan ajar dan alat praktek yang digunakan dalam proses belajar di kelas. Sarana Prasarana pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu saran prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar belum terpenuhi dengan baik.

Hal ini disebabkan karena : kurang optimal dan lengkapnya pemakaian teknologi seperti komputer dan saluran media internet di sekolah ini padahal kurikulum 2013 ini menuntut penggunaan teknologi IT yang memadai. Disamping itu, terhambatnya pendistribusian buku ajar dan buku panduan guru yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Dinas Pendidikan menghimbau kepada setiap sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk berusaha dalam memfasilitasi pelaksanaan itu sendiri seperti mendownload buku ajar dan buku panduan guru.

Oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan kurikulum 2013 belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar belum semua terpenuhi. Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi.

### **Disposisi Implementor**

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar cukup baik.

Dinas Pendidikan selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan LPMP selalu siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti KTSP yang dilakukan pemerintah dengan niatan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 berjalan seperti yang diharapkan, sesuai dengan instruksi dari pusat Dinas Pendidikan bertanggung jawab mempersiapkan kepala sekolah dan guru untuk memahami dan melaksanakan Kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada instansi terkait serta melaksanakan pembinaan atau pelatihan yang bekerjasama dengan LPMP kepada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.

Adanya perubahan kurikulum ini pihak sekolah dan guru-guru yang melaksanakan kurikulum 2013 pun menyambut dengan antusias seperti mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan tercapainya pelaksanaan Kurikulum 2013 dan dengan cekatan guru berusaha menerapkan apa yang sudah mereka pahami dari pelatihan yang mereka dapatkan. Antusias terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 juga dapat dilihat dari komitmen guru sebagai mediator siswa di sekolah menjadi lebih berinovasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar.

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila

tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang mungkin menjadi hambatan pelaksanaan Kurikulum 2013. Karena Implikasi yang akan terjadi dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 kedepannya jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

### Struktur Birokrasi

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kota Pematangsiantar, peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. *Standard Operating Procedure* (SOP)

Kurikulum 2013 ini merupakan kebijakan yang harus direncanakan dengan matang karena Kurikulum 2013 ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya standard operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Pematangsiantar telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau *Standard Operational Prosedur* (SOP).

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau *standard operating prosedur* (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur atau standard yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pendidikan yang lebih baik di Kota Pematangsiantar. Dan dari pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan standard prosedur operasi yang berupa juknis pelaksanaan kebijakan sudah begitu paham dan mengerti *standard operasional prosedur* (SOP).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pematangsiantar ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggungjawab dari setiap pelaksana kebijakan Kurikulum 2013. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 di kota Pematangsiantar, struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu pusat, provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini menjadikan setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan Kurikulum 2013. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya serta tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi menjadi seragam dan konsisten.

#### b. Fragmentasi/Pembagian Tanggungjawab

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar telah berjalan cukup baik. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati berjalannya implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di SMPN 7 ini telah terjalin koordinasi antar pelaksana Kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Pematangsiantar yaitu melalui kerjasama antara Dinas Pendidikan, LPMP dan sekolah. Melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas, Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan kepala sekolah dan guru dalam

memahami dan melaksanakan Kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada instansi terkait serta melaksanakan pembinaan atau pelatihan yang bekerjasama dengan LPMP ke sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.

Maka fragmentasi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang mengatakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kepada unit-unit organisasi. Fragmentasi yang dilakukan Dinas Pendidikan, LPMP dan sekolah di Kota Pematangsiantar dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 akan terus berjalan efektif ketika pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dengan penyebaran tanggung jawab yang baik.

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan di sekolah, maka dilakukan pembagian kerja dan dibarengi dengan pengawasan yang efektif. Pembagian kerja ini mengacu pada tugas sebagai, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guruprofesional;
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;
3. Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya;
4. Untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan;
5. Untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, *classroom action research*, referensi, dan lain-lain kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama;
6. Untuk menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (*school reform*), khususnya *focus classroom reform*, sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 7 Pematangsiantar telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan

### KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar dengan menggunakan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor serta struktur birokrasi untuk menguji implementasi kebijakan. Dari hasil temuan penelitian dan analisa, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar belum bisa dikatakan berjalan lancar dan sempurna meski sebenarnya dengan evaluasi yang diadakan tiap tahun, nantinya akan dapat dikatakan berjalan maksimal. Guru sebagai implementor yang terjun langsung kedalam kelas masih belum bisa optimal melakukan tupoksi yang seharusnya. Informasi yang didapat diawal terkait kurikulum memang ada, yakni melalui pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LPMP. Namun itu saja tidak cukup. Guru-guru masih harus banyak mendapat informasi dan pelatihan yang diperoleh dengan cara sendiri agar tidak ketinggalan dan masih menyesuaikan dengan kaedah kurikulum 2013. Begitu juga halnya dengan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar yang belum bisa memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh guru, terutama dalam hal konsep penilaian untuk siswa yang masih dirasa cukup rumit serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah.
2. Akan tetapi pada praktiknya kepada siswa, paling tidak sudah sesuai dengan karakteristik dan tuntutan kurikulum 2013 itu sendiri yakni menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik yang

meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba, menalar/mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Sebelum memasuki tahap-tahap pelaksanaan pendekatan tersebut siswa di beri tugas untuk mencari materi sendiri, dari materi yang didapat barulah siswa mengamati isi materi tersebut secara individu maupun kelompok, setelah tahap mengamati selesai salah satu siswa ditunjuk untuk maju kedepan untuk mempresentasikan, siswa lain dipersilahkan bertanya kepada guru atau temannya atas apa yang perlu ditanyakan atau apa yang belum dipahami, dari berbagai macam pertanyaan siswa dan jawaban guru tentu siswa mendapatkan informasi yang banyak dari situ siswa mulai mengumpulkan informasi. Jadi siswa diberi rangsangan agar siswa mampu aktif mencari informasi atau ilmu pengetahuan sendiri tidak seperti pada kurikulum sebelumnya yang dominan mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru.

3. Dari keempat faktor itu juga, ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi pelaksana kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 7 Pematangsiantar yaitu :
  - a. Guru kesulitan untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran
  - b. Kemampuan guru dalam mengakses internet juga menjadi kendala dalam mencari informasi.
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk media pembelajaran yang tidak semua siswa dan guru memiliki.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Iskandar.2010. *Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru*.Jakarta: Bestari Buana Murni.
- Anderson, James E. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.Jakarta : Bumi Kasih
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Daryanto.2014. *Pendekatan Pembelajaran SAINTIFIK Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Gava media
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press*, Washington.
- Hamalik, O. 2008. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Hamzah, B. Uno. 2009. *Psikologi Pendidikan* .Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim, R. er al. 2011. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta : Rajagrafindo.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.Yogyakarta : Erlangga.
- Kartini, Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*.Bandung : Alumni
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava media.
- Kusnandar.2008. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*.Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Miarso, Yusuf Hadi. 2008. *Teknologi Komunikasi Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Moleong, J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2009. *Standard Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. 2007. *Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Di Indonesia*Jakarta : Bumi Aksara
- Sadiman, Arief S dkk. 2008. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Uno.Hamzah. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran kompetensi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wina, Sanjaya, Prof. 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta.Media Pressindo.